

PERANAN LEMBAGA EKONOMI ISLAM ASPEK KAJIAN SEJARAH SOSIAL POLITIK EKONOMI

* Naurid Muhammad Rifa'I Ilyasa¹, Nur Izzati²

¹MAS. Al-Ikhlâs Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia

Email: Naurid.x4@gmail.com

²STAI Syamsul 'Ulum Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

Email: nurizzati2296@gmail.com

Abstract

The history of the development of Islamic Shari'a since the time of the Prophet Muhammad, is not only focused on the theological cleansing mission. However, Islamic law has become a universal law in running the wheel of life, one of which is the economy. Where the economy, is one of the characteristics of humans as intelligent creatures of God. In addition, the economy becomes a measure of the level of social status in society. During the da'wah of the Prophet Muhammad, it was recorded that the application of Islamic Sharia in the economy was regulated by establishing the Baitul Maal. Baitul Maal literally means a house to collect or store wealth. In addition, Baitul Maal functions as an institution or party that has a special task of handling all the assets of the people, both in the form of state revenues and expenditures. Thus, the concept of Baitul Maal as an Islamic economic platform is the beginning of the long history of cooperatives and banking based on Islamic law. The history of Islam in the context of economic development, and financial management, did not stop until the time of the da'wah of the Prophet Muhammad. However, it continued during the da'wah of Khulafah Al-Rasyidin (a leader who was guided by Allah SWT). It was during the leadership of Khulafah Al-Rasyidin that the Islamic government had a presidential system from 632-661 AD. Likewise, running the People's Economic Institution, which in this case is accommodated by Baitul Mal, continues to experience administrative development. It was during the time of Khulafah Al-Rashidin that economic administration and financial management based on Islamic Sharia began to be revolutionized until the government changed from the presidential term of Khulafah Al-Rashidun to the Moranki Government which began with the establishment of the Umayyad Dynasty. In fact, not only in the Islamic kingdoms of the Middle East, Islamization through the fields of Economics and Finance became one of the effective ways of da'wah in the archipelago until the establishment of the unitary state of the Republic of Indonesia today.

Keywords: Economics, History of Islamic Shari'a, Moranki Government,
Republic of Indonesia

Abstrak

Sejarah perkembangan Syariat Islam sejak zaman Rasulullah SAW, bukan hanya terpaku pada misi pembersihan secara Teologi saja. Namun Syariat Islam menjadi sebuah hukum yang universal dalam menjalankan roda kehidupan dimana salah satunya adalah perekonomian. Dimana perekonomian, merupakan salah satu ciri manusia sebagai makhluk tuhan yang berakal. Selain itu perekonomian menjadi sebuah ukuran tindak tanduknya tingkat status sosial di masyarakat. Dimasa dakwah Rasulullah SAW, tercatat penerapan Syariat Islam dalam perekonomian diatur dengan cara mendirikan Baitul Maal. Secara harfiah Baitul Maal, berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Selain itu, Baitul Maal berfungsi sebagai lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Dengan begitu, konsep Baitul Maal sebagai wadah perekonomian yang bersyariat Islam, merupakan sebab awal dari sejarah panjang koperasi dan perbankan yang berlandaskan syariat Islam. Sejarah Islam dalam konteks perkembangan ekonomi, dan manajemen keuangan, tidak berhenti sampai dimasa dakwah Rasulullah SAW saja. Namun, terus berlanjut dimasa dakwah Khulafah Al- Rasyidin (pemimpin yang mendapat petunjuk Allah SWT). Dimasa kepemimpinan Khulafah Al- Rasyidin lah, pemerintahan Islam bersistem presidensial sejak 632 – 661 M. Begitupun menjalankan Lembaga Perekonomian umat yang mana dalam hal ini diwadahi oleh Baitul Mal, terus mengalami perkembangan secara administratif. Dimasa Khulafah Al- Rasyidin lah, administrasi ekonomi dan manajemen keuangan berdasarkan Syariat Islam mulai direvolusi sampai bergantinya pemerintahan dari presidensial masa Khulafah Al- Rasyidin menuju Pemerintahan Monarki yang diawali dengan berdirinya Dinasti Umayyah. Bahkan bukan hanya dikerajaan Islam Timur Tengah saja, Islamisasi melalui bidang Ekonomi dan Keuangan menjadi salah satu jalan dakwah yang efektif di Nusantara hingga berdirinya negara kesatuan republik Indonesia sekarang ini.

Kata Kunci: : Ekonomi, Sejarah Syariat Islam, Rasulullah SAW, Khulafah Al-Rasyidin, Pemerintahan Moranki, Republik Indonesia

A. Pendahuluan

Perjalanan panjang sejarah Agama Islam yang diyakini sebagai teologi awal dari langit sejak Nabi Adam AS diciptakan hingga Nabi Muhammad SAW, terus mengalami revolusi. Semua itu terjadi berdasarkan kurun waktu dan perubahan pemikiran manusia sebagai makhluk tuhan yang diciptakan dengan akal yang sempurna. Selain menyakini ontologi yang memang bersifat hakikat, namun Syariat Islam juga memberikan jalan dari permasalahan yang ada dalam realitas khidupan manusia. Salah satu diantaranya adalah Ekonomi, sebagai sumber primer dan sekunder terhadap kehidupan lahiriyah manusia. Dalam hal ini, Ekonomi sebagai kebutuhan pokok manusia menjadi kajian ilmu yang penting dalam ajaran agama Islam. Sehingga Ekonomi amat penting diantar dalam syariat agama Islam.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang atau kekayaan. Kekayaan yang di maksud adalah termasuk uang, perdagangan atau segala perindustrian. Sedangkan arti kata Syariat merupakan hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT dan sesama manusia berdasarkan Al-quran dan hadis Rasulullah SAW. Menurut M.A. Manan ekonomi syariah adalah ilmu

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Lain halnya menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, dirinya mengartikan ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.

Dalam sejarah, Perekonomian berbasis Syariat Islam bermula dimasa dakwah Rasulullah SAW periode Madinah atau sekitar 2 tahun masa hijrah yang bertepatan dengan tahun 623 masehi. Pada awal mula hadirnya ekonomi yang berlandaskan Syarat Islam, banyaknya penduduk muslim Kaum Anshar sebagai saudagar kaya menghamburkan hartanya. Namun kaum Anshar adalah kaum yang beriman dan menerima hijrah Rasulullah SAW, bersama sahabatnya di Mekah. Sedangkan Kaum Muhajirin adalah masyarakat Mekah yang mengikuti hijrah Rasulullah SAW demi mempertahankan keimanan. Oleh sebab hijrah itulah kaum Muhajirin, meninggalkan harta benda dan keluarga hingga menjadi serba kekurangan. Dari peristiwa itulah Rasulullah SAW, diberi wahyu surat Al- Baqarah ayat 267 untuk disampaikan pada umatnya yang berkecukupan agar mengeluarkan zakat. Selain itu untuk mengantisipasi ketimpangan sosial Rasulullah SAW, membangun *Baitul Mal* di Yasrib. Dari sanalah perekonomian Islam mulai tumbuh dan berkembang di masa dakwah Rasulullah SAW, menuju periode kepemimpinan presidensial Khulafah Al-Rosyidin hingga sistem pemerintahan Islam yang Monarki.

B. Metode

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif, yang berdasarkan pada kajian ilmu sejarah. Dimana kajian tersebut adalah teori dan metodologi sejarah, diantaranya heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Selain itu, penelitian ini, juga menggunakan ilmu bantu sejarah berupa ilmu filsafat sejarah dan metode diroyah Ibnu Khaldun.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Hadirnya Ekonomi Islam Era Rasulullah SAW

Sejarah Islamisasi dibidang perekonomian masa dakwah Rasulullah SAW, memang cukup sulit mendapat sumber yang relevan. Mengingat dimasa dakwah Rasulullah SAW, masih sangat mendasar. Sehingga permasalahan umat baik secara Hukum *Ubudiyah* (beribadah ritual secara langsung) maupun ibadah yang bersifat *Ghourul Mahdhah* (ibadah sosial), langsung diserahkan pada wahyu Rasulullah SAW. Sebagai mana yang kita ketahui, secara lahiriyah nabi kita Muhammad SAW terkenal dengan sebutan *Nabiyil Mummy* (nabi yang tidak bisa baca tulis). Maka dapat difahami, apa bila administratif masa Rasulullah SAW belum begitu tertata.

Karena pada masa itu para sahabat, lebih tefokus terhadap kekuatan penghafalan ingatan dan penglihatan mereka dalam menjalankan tuntunan Syariat Islam terutama saat periode awal dakwah di Mekah. Setelah perintah untuk berhijrah ke Yasrib (Madinah), Rasulullah SAW mulai menjalankan perintah Allah SWT lebih kompleks terutama dibidang ibadah *Ghourul Mahdhah*. Hal tersebut disebabkan karena Rasulullah SAW dan kamu Muhajirin, harus beradaptasi dengan masyarakat Yasrib yang kala itu dikategorikan sebagai masyarakat metropolitan Gazirah Arab.

Dengan begitu untuk dapat menyampaikan misi islamisasi baik secara *Ubudiyah* maupun *Mu'amalah* (hubungan kemanusiaan) Rasulullah SAW memusatkan kedua hal tersebut di Masjid Nabawi. Dimana masjid pada awalnya digunakan sebagai tempat menjalankan ibadah ritual, termasuk ibadah *Mu'amalah* yang dalam hal ini adalah roda perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat muslim. Dimana didalamnya dilaksanakan kegiatan pembagian zakat, simpan pinjam uang, penanaman modal, dan sarana informasi kerja. Dari kegiatan itulah, kita bisa melihat bahwa masjid zaman Rasulullah SAW, juga menjadi cikal bakal sejarah awal mula berdirinya lembaga perekonomian berbasis Syariat Islam. Yang kemudian kelembagaan perekonomian di mesjid itu dinamakan dengan istilah *Baitul Mal* (lembaga perekonomian).

Fungsi Lembaga Ekonomi Zaman Raulullah SAW

| Pemasukan Rutin | Pemasukan Insidentil |
|--|---------------------------------------|
| Zakat | Ghanimah Fa'I (Harta rampasan perang) |
| Jizyah/Pajak kepada masyarakat non muslim untuk jaminan keamanan | Ma'addin (Hasil Pertambangan) |
| Kharaj/Pajak Tanah | Rikaz/ harta karun |
| Usyur/Pajak Bea Cukai/ Pajak Esport-Import | Harta warisan yang tidak terbagi |
| | Harta temuan |
| | Harta yang tidak diketahui pemiliknya |

2. Peran Lembaga Ekonomi Islam Masa Pemerintahan Presidensial Khulafa Al-Rasyidin

Sepeninggal Rasulullah SAW kepemimpinan umat Islam diserahkan kepada para sahabatnya yang terutama. Para sahabat itu diantaranya adalah Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Usman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib dengan gelar mereka Khulafa Al-Rasyidin (Pemimpin yang diberi petunjuk Allah SWT). Dimasa kepemimpinan Khulafa Al-Rasyidin, sistim pemerintahan Islam dipilih secara langsung oleh kaum muslimin. dengan ditandainya sistim pemilihan umum itulah, pemerinahan era Khulafa Al-Rasyidin bercorak presidensial. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Khulafa Al-Rasyidin pertama yang ditunjuk adalah Abdullah bin Abu Quhafah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Terpilihnya beliau sebagai pemimpin Umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW, ditunjuk oleh putrinya sendiri Aisyah yang juga menjadi istri Nabi SAW.

Dimasa kepemimpinannya, perekonomian hasil dari membendaharaan penerimaan Zakat, Jizyah, Ghanimah Kharaj dan lainnya masih dilakukan di masjid seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. karena pada masa kepemimpinannya, Islam belum melakukan ekspansi secara luas. Sehingga Abu Bakar, belum sempat membenahi secara administratif

lembaga keuangan negara. Pembagian harta untuk kesejahteraan Umat Islam ataupun Non-Muslim masa kepemimpinan Abu Bakar lebih memilih mengikuti sebagaimana dimasa kepemimpinan Rasulullah SAW. Hal itu dilakukan Abu Bakar, agar pembagian harta untuk rakyat menjadi sama rata. Kebijakan tersebut menuai kontroversi dikalangan para sahabat yang lain, terutama Kaum Muslimin yang sudah ada sejak Rasulullah SAW berdakwah (*Assabikunal Awwalun*). Kaum Muslimin *Assabikunal Awwalun*, meminta agar kebijakan Abu Bakar dalam pembagian harta terhadap fakir-miskin masa Rasulullah SAW dengan sepeninggalnya memiliki perbedaan jumlah.

Alasan itu dikeluarkan Kaum Muslimin *Assabikunal Awwalun*, karena merasa lebih lama berjuang untuk Islam dibandingkan Kaum Muslimin yang baru masuk Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Namun kebijakan Abu Bakar, tetap dalam pendiriannya dengan mengatakan, “*Saya sangat menyadari akan kelebihan dan keutamaan orang – orang yang anda sebutkan, tapi masalah tersebut akan dibalas oleh Allah. Sedangkan masalah kebutuhan dengan kehidupan, kesamaan lebih baik dari pada keutamaan*”. Selama kepemimpinan Abu Bakar, umat muslim mendapatkan kesejahteraan secara merata dibidang ekonomi sampai beliau dipanggil oleh kehadiran Allah SWT tahun 644 masehi.

Sepeninggal Abu Bakar, kepemimpinan muslimin dilanjutkan oleh Umar Bin Khattab. Diawal kepemimpinannya, Umar segera merubah kebijakan tentang manajemen keuangan Islam masa kepemimpinan Abu Bakar. Dimana Abu Bakar menerapkan penyamarataan pembagian harta antara pihak *Assabikunal Awwalun*, dengan kaum Muslimin sepeninggal Rasulullah SAW. Menurut Umar, pihak kaum muslim *Assabikunal Awwalun* menjadi pejuang lebih berat dan lama dibandingkan pihak kaum muslim sepeninggal Rasulullah SAW. dengan dirubahnya manajemen keuangan di *Baitul Mal*, pembagian harta untuk kesejahteraan Kaum Musliminpun menjadi tidak merata.

Banyak terjadi ketimpangan sosial dari segi ekonomi, bahkan banyak kasus kemiskinan terjadi dimasa kepemimpinan Umar. Sehingga dikisahkan bahwa ketika Umar hendak melihat kondisi rakyat, didapatinya disebuah rumah seorang Wanita tengah merebus batu untuk bisa menghentikan tangisan kedua anaknya karena kelaparan. Melihat hal itu, Umar segera menghampiri wanita dan anaknya untuk mencari tahu keadaan mereka. wanita tersebut mengatakan : “*Khalifah telah berbuat Dzalim kepada kami*”. Mendengar ucapan wanita tersebut, Umar bergegas berlari dan mengutus utusannya kebalik ke rumah wanita miskin tersebut dengan membawa beberapa karung makanan dan mendata masyarakat fakir-miskin. Dari kejadian itulah Umar Bin Khattab, merubah administrasi pembagian harta untuk fakir-miskin seperti sitim Abu Bakar. Bahkan Umar menjadi pemimpin yang adil, dengan tidak membedakan rakyat dari status sosialnya fakir miskin atau kaya, rakyat jelata atau bangsawan, tuan atau budak. Selain itu istri, anak dan para pembesaryapun disamakan hidup sederhana.

Berdasar kejadian itulah Umar Bin Khattab mengatur lembaga ekonomi dengan didirikannya lembaga keuangan syariah, yang kemudian dikenal dengan nama *Bitul Mal* pada tahun 16 H. Pendirian *Baitul Mal* masa kepemimpinan Umar berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang berperan untuk mensejahterakan rakyat, serta dibuat lebih administratif dan struktural dengan Ditunjuknya Abdul Rahman Bin Auf sebagai Akuntan

pertama dalam sejarah Manajemen Keuangan Islam. Dimasa Umar Bin Khattab, bukan hanya pembangunan *Baitul Mal* secara administratif dan bonafide, namun dimasanya pendirian departemen juga dilakukan. Sehingga peranan *Baitul Mal*, diperuntukan mendanai departemen pemerintahan Islam.

Departemen Pertama Dalam Sejarah Pemerintahan Islam yang Didanai *Baitul Mal*

| No | Departemen | Fungsi | Rutinitas Bantuan |
|----|--|--|------------------------|
| 1 | Departemen Jaminan Sosial | Berperan memberikan sumbangan bantuan untuk orang sakit, lansia, orang distabilitas, fakir-miskin, yatim piatu, janda dan orang yang tidak mampu melakukan pekerjaan | Setiap setahun sekali |
| 2 | Departemen Pelayanan Militer | Untuk mendistribusikan uang sumbangan kepada keluarga yang terlibat dimedan perang karena mereka tidak ada gaji. Sehingga subangan tersebut untuk kesejahteraan kehidupan keluarganya. | Dilakukan setiap bulan |
| 3 | Departemen Kehakiman dan Eksekutif | Bantuan ini diberikan untuk para hakim dan pegawai eksekutif. Dengan tujuan agar mereka tidak tergiur dengan suap | Dilakukan setiap bulan |
| 4 | Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam | Bantuan dialokasikan untuk orang yang menyebarkan agama Islam, Guru, Muadzin dan Imam. | Dilakukan setiap bulan |

Sejak Kepemimpinan Umar Bin Khattab, ekspansi dan penaklukan kewilayah semenanjung Arab sudah mulai dilakukan, karena sudah banyak orang yang memeluk agama Islam. Ekspansi untuk penyebaran agama dimasa Umar Bin Khattab dimualai atas penaklukannya di wilayah kerjaan besar seperti Irak, Iran, Siria dan Mesir. Kepemimpinan Umar Bin Khattab berlangsung sejak 644-656 M, yang kemudian kekhalifahan diambil alih oleh Usman Bin Affan.

Dalam perjalanan kepemimpinannya, Usman Bin Affan terlihat sangat berbeda dengan kepemimpinan Khalifah sebelumnya. Kebijakan pengelolaan *Baitul Mal* untuk departemen dan sumbangan kesejahteraan rakyat terlihat sangat timpang. Ada yang

mendapat bantuan jumlah banyak dan ada yang mendapat jumlah bantuan kurang, bahkan ada yang tidak mendapat bantuan sama sekali. Hal ini dijadikan kebijakan Usman Bin Affan, karena menurutnya Khalifah berhak atas pengelolaan dan penggunaan kas *Baitul Mal* secara pribadi. Selain itu, kebijakan Usman atas pengangkatan pejabat tinggi negara berdasarkan kepada kekeluargaan. Dari sini lah sejarah nepotisme untuk menduduki jabatan di dunia pemerintahan Islam bermula.

Terlebih pengangkatan Marwan Bin Hakam sebagai petinggi negara dari kerabat Usman, semakin mencolok terhadap terjadinya kesewenang-wenangan. Bahkan akibat *Baitul Mal* dan departemen lainnya tidak berjalan sebagai mana mestinya, menyebabkan perekonomian tidak mereta. Banyak terjadi korupsi, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari keluarga Usman. Dari kebijakan pemerintah yang buruk itulah, banyak terjadi ketimpangan sosial, kemiskinan, hingga terjadinya perang antar suku dan pemberontakan di setiap daerah. Sehingga pada akhirnya, Usman Bin Affan tewas ditangan pemberontak yang datang dari Mesir. Tewasnya Usman Bin Affan, menjadi tragedi yang memilukan dalam sejarah kepemimpinan Khulafah Al-Rasyidin.

Seteningal Usman Bin Affan, pemerintahan Islam dipimpin oleh Ali Bin Abi Thalib dari tahun 656-661M. Kepemimpinan Ali, administrasi pemerintah terutama pengelolaan lembaga perekonomian negara yang dalam hal ini dibawah perbendaharaan *Baitul Mal* kembali dibenah. Sehingga roda perputaran bantuan untuk masyarakat melalui departemen, difungsikan kembali. Dengan kata lain, kebijakan kepemimpinan Ali lebih mengikuti kebijakan masa kepemimpinan Umar Bin Khatthab. Selain itu, Ali juga mendirikan *Baitul Mal*, yang khusus menangani kesejahteraan rakyat. *Baitul Mal* urusan zakat, *Baitul Mal* urusan jizyah, *Baitul Mal* urusan rikaz, *Baitul Mal* urusan ghanimah dan lain sebagainya. Dari pengaturan perbendaharaan itulah, perekonomian rakyat kembali pulih.

Tidak terjadi ketimpangan sosial, kemiskina, kekurangan dan perpecahan yang diakibatkan oleh melemahnya manajemen perbendaharaan ekonomi rakyat di *Baitul Mal*. Namun meski sejarah perekonomian umat Islam telah pulih dimasa Ali Bin Abi Thalib, pergolakan politik lebih meluap. Pergolakan politik tersebut di dalangi oleh Panglima Muawiyah Bin Abi Sufyan dan kaum pendukung Ali. Perdebatan politik dikalangan pendukung dan bukan pendukung Ali terus bergejolak, Samapai Khalifah Al-Rasyidin terahir lengser dari jabatannya yang kemudian diambil alih oleh Muawiyah Bin Abi Sufyan dari Bani Umayyah. Lengsernya Ali Bin Abi Thalib menandai berakhirnya kepemimpinan Khalifah Al-Rasyidin dalam bentuk pemerintahan Islam Presidensial.

3. Peran Lembaga Ekonomi Syraiah Dimasa Pemerintahan Monarki

Jatuhnya kekuasaan pemerintah Islam dari Khulafah Al-Rasyidin oleh Muawiyah Bin Abi Sufyan, menjadikan dirinya sebagai Khalifah. Namun, kepemimpinannya menjadi sejarah Islam dalam bentuk Monarki. Dimasa kekhalifahan Bani Umayyah, manajemen keuangan *Baitul Mal* diambil alih oleh Bani Umayyah sepenuhnya. Sehingga rakyat hanya wajib menyeter dan dilarang menanyakan penggunaannya. Kebijakan ini terus berlanjut, hingga berakhir pada kepemimpinan Sultan ke-8 yaitu Umar Bin Abdul Azis (717-720M). Dimasa kepemimpinannya, banyak harta yang tidak jelas asal usulnya. Sehingga para

petinggi kesultanan Dinasti Umayyah diwajibkan mengembalikan harta yang mereka peroleh dari hasil yang tidak jelas asal usulnya.

Bahkan khalifah Umar Bin Abdul Azis, mengembalikan harta warisan ayahnya Abdul Azis Bin Marwan sekitar 40.000 dinar/tahun pada *Baitul Mal*. Dimana harta itu berasal dari kampung Fadak sebuah desa sebelah utara Mekah, yang sudah menjadi tanah negara sejak Rasulullah SAW wafat. Tanah negara tersebut diambil alih dan dijadikan hak milik pribadi oleh ayah Umar Bin Abdul Azis. Fungsi *Baitul Mal* dimasa kepemimpinannya, bukan hanya untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan perekonomian negara, namun digunakan pula untuk pembiayaan penyebaran agama Islam Sampai ke Kerajaan Sri Wijaya di Nusantara.

Pembiayaan untuk penyebaran Islam ke Nusantara, menjadi peren *Baitul Mal*. Tercatat Sri Indrawarman sebagai Raja Sri Wijaya pertama yang memeluk Islam dibawah kesultanan Dinasti Umayyah masa kepemimpinan Umar Bin Abdul Azis. Dimana peranan *Baitu Mal* membiayai dakwah para ulama ke Sriwijaya atas permintaan Raja Sri Indrawarman dari Sriwijaya. Keislaman Kerajaan Sriwijaya, merubah mamanya menjadi Sribuja. Dimana mengikuit kebijakan syariat Islam atas tuntunan Dinasti Umayyah, kerajan Sribuja juga ikut berperan dalam Islamisasi melalui jalur ekonomi syariah. Seringkali Kerajaan Sribuja menyetor zakat untuk *Baitul Mal* pada Dinasti Umayyah yang diperuntukan pembiayaan penyebaran Islam. Para ulama Dinasti Umayyah masa Khalifah Umar Bin Abdul Azis, banyak dikirim ke Sribuja Nusantara untuk mengajarkan Syariat Islam terutama dibidang fiqih Mu'amalah. Maka tidak diherankan kalaulah, penyebaran agama Islam di Nusantara lebih efektif dengan metode ekonomi dalam hal ini jalur perdagangan maritim dan agraris.

D. Kesimpulan

Sejarah Perkembangan Islam dari masa kepemimpinan Rasulullah SAW (masa turunnya wahyu), Khulafah Al – Rasyidin yang berbentuk pemerintahan presidensial dan masa kekhalifahan yang berbentuk monarki tidak lepas dari peran perekonomian. Dimana bidang perekonomian ini, menjadi sebuah lembaga pertama dalam sejarah Islam sejak Rasulullah SAW 2 tahun berhijrah ke Yasrib . Pendirian lembaga ekonomi berbasis syariah, dikarenakan penduduk Sasrib adalah kalangan metropolitan dibandingkan penduduk Mekah. Pendirian lembaga ekonomi syariah diperuntukan Rasulullah SAW dan para Sahabat agar dapat melakukan syiar Islam dengan cara bersosialisasi. Lebaga tersebut dinamakan *Baitul Mal*, yang pertama kali difungsikan di masjid Nabawi. Prinsip dari *Baitul Mal* masa Rasulullah SAW adalah menampung zakat, infak dan sodakoh untuk tujuan mengibarkan agama Islam lebih luas. begitu pula dimasa Khulafah Al – Rasyidin, administrasi keuangan semakin diperbaharui meskipun pernah terjadi penyelewengan hak guna pakai dimasa Khalifah Usman Bin Affan. Peran *Baitul Mal* semasa Dinasti Umayyah, hanya berperan sebagai badan lembaga kas dan untuk kepentingan negara. Namun dimasa khalifah Umar Bin Abdul Aziz, *Baitul Mal* diperuntukan kembali sebagai biaya kesejahteraan rakyat, negara dan penyebaran Islam ke berbagai negara termasuk Nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad M, Zaidi, 2003. Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam, Bandung: Angkasa.
- Ahmad Dimyathi dkk, 1987. Islam dan Koperasi, Jakarta : Koperasi Jasa Informasi
- Dawam Rahrjo, 1999. Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Khaldun, Ibnu. 1986. Muqaddimah, Terjemah Oleh Ahmadie Toha. JKT :Pustaka Firdaus.
- Kuntowijoyo. 2013. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mohammad Daud Ali, 1988. Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta : UI Press.
- Monzer Kahf, 1987. Deskripsi Ekonomi Islam, Jakarta : Minerret.
- Nor Huda Abdul Qodir Shaleh, 2014. Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia,
- Nourouzzaman Shiddiqi, 1992. Fiqik Indonesia Penggagas dan Gagasannya, Yogyakarta :Pustaka Pelajara.
- Sofwan Idris, 1992. Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Jakarta : Cita Putra Bangsa. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.